

Optimalisasi Penatausahaan Keuangan Melalui Aplikasi Siksda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Oleh : Siti Alfiyah

Progam Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
2026



Latar Belakang

- Penatausahaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam **mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)**. **Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitaas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan.
- Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah menerapkan digitalisasi pengelolaan keuangan melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKSDA). **Aplikasi SIKSDA** dirancang untuk mengintegrasikan proses penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan secara elektronik guna meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
- Kabupaten Sidoarjo telah mengimplementasikan SIKSDA sejak tahun 2017.

Gap Permasalahan

- Meskipun data serapan anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif tinggi, hasil observasi awal menunjukkan **masih adanya kendala dalam implementasi SIKSDA**, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan fitur sistem, serta kendala teknis dan koordinasi antarunit kerja.
- penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai **optimalisasi penatausahaan keuangan melalui aplikasi SIKSDA** pada tingkat unit kerja, serta memberikan kontribusi praktis dan teoretis bagi pengembangan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan efektif.
- Penelitian **ini bertujuan untuk** menganalisis tingkat optimalisasi penerapan SIKSDA. Berdasarkan 3 indikator menurut Siringoringo (2005), yaitu: Tujuan, Alternatif Keputusan, dan Sumber daya yang membatasi.

Penelitian Terdahulu

1. **Hermelinda (2018)** dalam penelitiannya menemukan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya kompetensi sumber daya manusia, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta lemahnya sistem penatausahaan keuangan. Penelitian ini menegaskan bahwa teknologi informasi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia.
2. **Anggraeni dan Choiriyah (2025)** meneliti efektivitas penerapan SIKSDA pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa SIKSDA berkontribusi positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam mendukung ketepatan waktu pelaporan dan keterpaduan data keuangan. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada level makro dan belum mengkaji secara mendalam implementasi SIKSDA pada tingkat unit kerja.

Persamaan antara dua penelitian terdahulu, yaitu sama membahas pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah. maupun penelitian terdahulu menempatkan **pemanfaatan teknologi informasi** sebagai instrumen strategis dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

Perbedaan Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada **fokus dan ruang lingkup kajian**. Penelitian terdahulu umumnya dilakukan pada **level makro**, seperti pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dengan fokus pada efektivitas sistem secara keseluruhan. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji **optimalisasi penatausahaan keuangan pada level mikro**, yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Metode Penelitian

- **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif

- **Lokasi Penelitian**

Bag. Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

- **Fokus Penelitian**

Strategi Optimalisasi **SIKSDA** sebagai aplikasi penatausahaan keuangan di Bagian Organisasi Kabupaten Sidoarjo

- **Tujuan Penelitian**

Menganalisis efektivitas implementasi SIKSDA dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan

Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan dan penggunaan SIKSDA, seperti keterbatasan infrastruktur, kompetensi SDM, atau integrasi sistem.

- **Teknik Penentuan Informan**

Purposive Sampling

- **Informan Penelitian**

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab Sidoarjo, Perangkat daerah teknis BPKAD, Bendahara pengeluaran pada bagian perencanaan dan keuangan.

- **Teknik Pengumpulan Data**

Penarikan rekapitulasi data dari SIKSDA, Analisis Data, Wawancara, Dokumentasi

- **Key Informan**

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Hasil dan Pembahasan

INDIKATOR 1: Tujuan

Tujuan implementasi SIKSDA adalah mewujudkan **penatausahaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut Siringoringo (2005). Tujuan dapat dinilai dari maksimalisasi dan minimalisasi.**

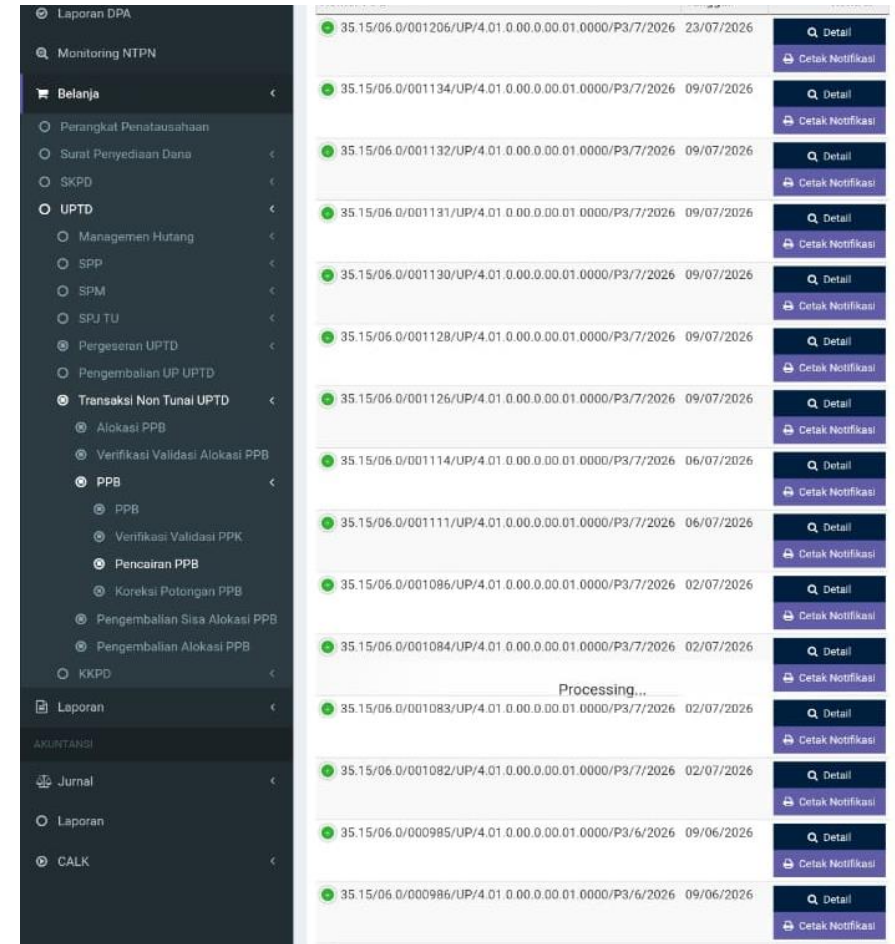
Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara SIKSDA.

Maksimalisasi

- Mempermudah proses administrasi.
- Mempercepat pencairan dan pelaporan. Sangat cepat dan *real time*, hanya saja untuk proses pencairan melalui non bank jatim membutuhkan waktu sekitar 3 hari kerja.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Minimalisasi

- Mengurangi pencatatan manual.
- Mengurangi human error dan manipulasi data.
- Meminimalkan keterlambatan penyusunan laporan.



The screenshot displays the SIKSDA application interface. On the left is a dark sidebar menu with categories like 'Laporan DPA', 'Monitoring NTPN', 'Belanja', 'UPTD', 'Transaksi Non Tunai UPTD', 'Alokasi PPB', 'PPB', 'Pencairan PPB', 'Koreksi Potongan PPB', 'Pengembalian Sisa Alokasi PPB', 'Pengembalian Alokasi PPB', 'KKPD', 'AKUNTANSI', 'Jurnal', 'Laporan', and 'CALK'. The main area shows a list of transactions with columns for a green status icon, a long alphanumeric code, a date, and a 'Detail' button. A 'Processing...' status is visible in the middle of the list.

Status	Code	Date	Action
●	35.15/06.0/001206/UP/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2026	23/07/2026	Detail
●	35.15/06.0/001134/UP/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2026	09/07/2026	Detail
●	35.15/06.0/001132/UP/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2026	09/07/2026	Detail
●	35.15/06.0/001131/UP/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2026	09/07/2026	Detail
●	35.15/06.0/001130/UP/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2026	09/07/2026	Detail
●	35.15/06.0/001128/UP/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2026	09/07/2026	Detail
●	35.15/06.0/001126/UP/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2026	09/07/2026	Detail
●	35.15/06.0/001114/UP/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2026	06/07/2026	Detail
●	35.15/06.0/001111/UP/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2026	06/07/2026	Detail
●	35.15/06.0/001086/UP/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2026	02/07/2026	Detail
●	35.15/06.0/001084/UP/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2026	02/07/2026	Detail
Processing...			
●	35.15/06.0/001083/UP/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2026	02/07/2026	Detail
●	35.15/06.0/001082/UP/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2026	02/07/2026	Detail
●	35.15/06.0/000985/UP/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2026	09/06/2026	Detail
●	35.15/06.0/000986/UP/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2026	09/06/2026	Detail

Gambar Tampilan Transaksi Melalui SIKSDA

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo

Hasil dan Pembahasan

INDIKATOR 2: Alternatif Keputusan

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo memilih SIKSDA sebagai alternatif terbaik. Menurut Siringoringo (2005), alternatif keputusan merupakan proses memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia. Suatu keputusan dikatakan optimal apabila alternatif yang dipilih mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan alternatif lainnya

Indikator alternatif keputusan juga dapat dianalisis secara lebih mendalam melalui hasil wawancara. *"Adanya SIKSDA seluruh pengelolaan keuangan daerah menjadi mudah, karena seluruh proses dilakukan di aplikasi fitur-fitur yang paling sering digunakan dalam pelaksanaan tugas antara lain pergeseran NPK, verifikasi PPB, pencairan PPB, verifikasi SPP dan SPM LS, upload dokumen SPM, serta verifikasi SPM."* Intensitas penggunaan berbagai fitur tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah memilih alternatif digital sebagai mekanisme utama dalam seluruh tahapan penatausahaan keuangan, mulai dari proses administrasi internal hingga pencairan dan pelaporan.

Perkembangan Inovasi SIKSDA	
Tahun	Inovasi
2018	Integrasi real- time dengan Bank Jatim
2022	Fitur non-tunai & paperless
2024	Integrasi tanda tangan elektronik BSR untuk SPM dan SP2D
2024	Otomatisasi CaLK

Tabel. Perkembangan SIKSDA

Sumber: Hasil Wawancara Diolah Penulis

Hasil dan Pembahasan

INDIKATOR 3: Sumber Daya yang Membatasi

Implementasi SIKSDA telah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, pelatihan, serta fasilitas pendukung dari BPKAD. Akan tetapi, pemerataan kompetensi pengguna, ketergantungan pada operator tertentu, serta kendala jaringan internet dan server masih menjadi faktor pembatas dalam optimalisasi sistem. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM dan penguatan infrastruktur teknologi diperlukan agar implementasi SIKSDA dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan

“Dalam kondisi tertentu, ketika terjadi kendala teknis atau kesalahan dalam proses input data, masih terdapat ketergantungan terhadap pegawai yang memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai sistem.” Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi keuangan berpotensi mengalami keterlambatan apabila personel yang bersangkutan tidak berada di tempat atau tidak dapat dihubungi.

Hal serupa disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo bahwa *“Human error sering terjadi, keterlambatan dokumen, perlambatan sistem saat peak season”*.

Pegawai yg memiliki akses SIKSDA	Total Pegawai
Pengguna Anggaran	49
Bendahara Pengeluaran	49
Bendahara Pengeluaran Pembantu	58
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	49

Tabel. Jumlah Pegawai yang Mengoperasikan SIKSDA

Sumber: Hasil Wawancara Diolah Penulis

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Choiriyah (2026) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur teknologi, serta pelaksanaan pelatihan secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKSDA) di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo secara umum telah berhasil mengoptimalkan penatausahaan keuangan daerah. Ditinjau dari teori optimalisasi Siringoringo (2005), indikator **tujuan** telah tercapai karena SIKSDA mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas melalui proses pengelolaan keuangan yang terintegrasi. Pada indikator **alternatif keputusan**, digitalisasi melalui SIKSDA terbukti menjadi pilihan yang lebih tepat dibandingkan sistem manual karena mampu mempercepat pencatatan transaksi, penyusunan laporan, serta mengurangi risiko kesalahan administratif. Sementara itu, pada indikator **sumber daya yang membatasi**, meskipun organisasi telah didukung oleh sumber daya manusia, pelatihan, dan fasilitas pendukung, masih terdapat kendala berupa belum meratanya kompetensi pengguna serta keterbatasan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet, server, dan integrasi sistem yang memengaruhi optimalisasi implementasi. Dengan demikian, keberhasilan implementasi SIKSDA tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan organisasi, dan pengembangan infrastruktur secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengguna, penyempurnaan fitur aplikasi, serta penguatan infrastruktur menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Reference

- Anggraeni, & Choiriyah. (2025). *[Topik terkait efektivitas SIKSDA]*.
- Halim. (2011). *[Topik penatausahaan keuangan daerah]*.
- Hermelinda. (2018). *[Penelitian mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah]*.
- Mardiasmo. (2018). *[Pengelolaan keuangan publik dan akuntabilitas]*.
- Nugrahani. (2008). *[Metodologi penelitian kualitatif]*.
- Pratama. (2023). *[Keberhasilan sistem informasi keuangan daerah]*.
- Rachman, et al. (2024). *[Purposive sampling dalam penelitian kualitatif]*.
- Rahman, & Fitriani. (2021). *[Efisiensi penerapan sistem informasi keuangan daerah]*.
- Rohmah. (2022). *[Pengelolaan APBD dan transparansi laporan pertanggungjawaban]*.
- Sari, & Yuliani. (2022). *[Permasalahan umum dalam penatausahaan keuangan daerah]*.
- Silalahi. (2009). *[Analisis data kualitatif: reduksi, penyajian, dan verifikasi]*.
- Waruwu. (2023). *[Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan analitis]*.
- Widyaiswara. (2022). *[Analisis data dalam penelitian kualitatif]*.